



PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Candra Fajri Ananda

Dekan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya

HARMONIZING / TRANSFORMING / CREATING FUTURE

feb.ub.ac.id

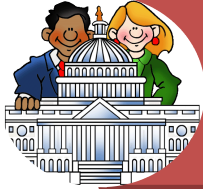
Accredited by:



Membership:



Teori Pemerintah vs Mekanisme Pasar



GOVERNMENT

Vs



MARKET

6 ways governments can encourage entrepreneurship

**Resources
Allocation**

Requirement:

- ✓ Marginal Benefit
- ✓ Timing
- ✓ Institutional

IF:

- ✓ Non Assymmetric
- ✓ Perfect Competition
- ✓ Non Excludable

Reinventing Government:

The new public management (10 prinsip dasar)



Catalytic Government : Steering Rather Than Rowing

- Pemerintah berfokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik



Community-Owned Government : Empowering Rather Than Serving.

- Pemerintah hendaknya lebih berorientasi untuk memberdayakan masyarakat tidak sekedar melayani



Competitive Government : Injecting Competition into Service Delivery

- Pemerintah perlu memunculkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik.



Mission- Driven Government : Transforming Rule- Driven Organizations).

Mengubah organisasi yang digerakan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakan oleh misi.



Results-oriented Government: Funding Outcomes, Not Input

Reinventing Government:

The new public management (10 prinsip dasar)



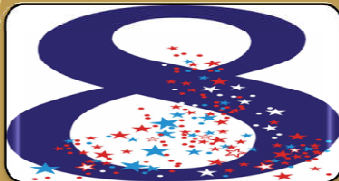
*Customer- Driven Government: Meeting the Needs of the Customer ,
Not the bureaucracy*

Memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.



Enterprising Government: Earning Rather than Spending)

Menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan.



Anticipatory Government : Prevention Rather Than Cure

Berupaya mencegah daripada mengobati.



Decentralized Government : From Hierarchy to Participation and Team Work

Dari hierarkhi menuju partisipatif dan kerja tim.



market-Oriented Government : Leveraging Change Through the Market .

Mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur pemaksaan)

Pembangunan Ekonomi Daerah (*Local Economic Development/LED*)

Definisi

- suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincoln Arsyad, 1999)

Tujuan

- Tujuan dari pembangunan ekonomi lokal (LED) adalah untuk membangun kemampuan ekonomi daerah setempat untuk memperbaiki masa depan ekonomi dan kualitas hidup untuk semua. Ini adalah proses dimana masyarakat, bisnis dan sektor non-pemerintah mitra bekerja secara kolektif untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (worldbank).

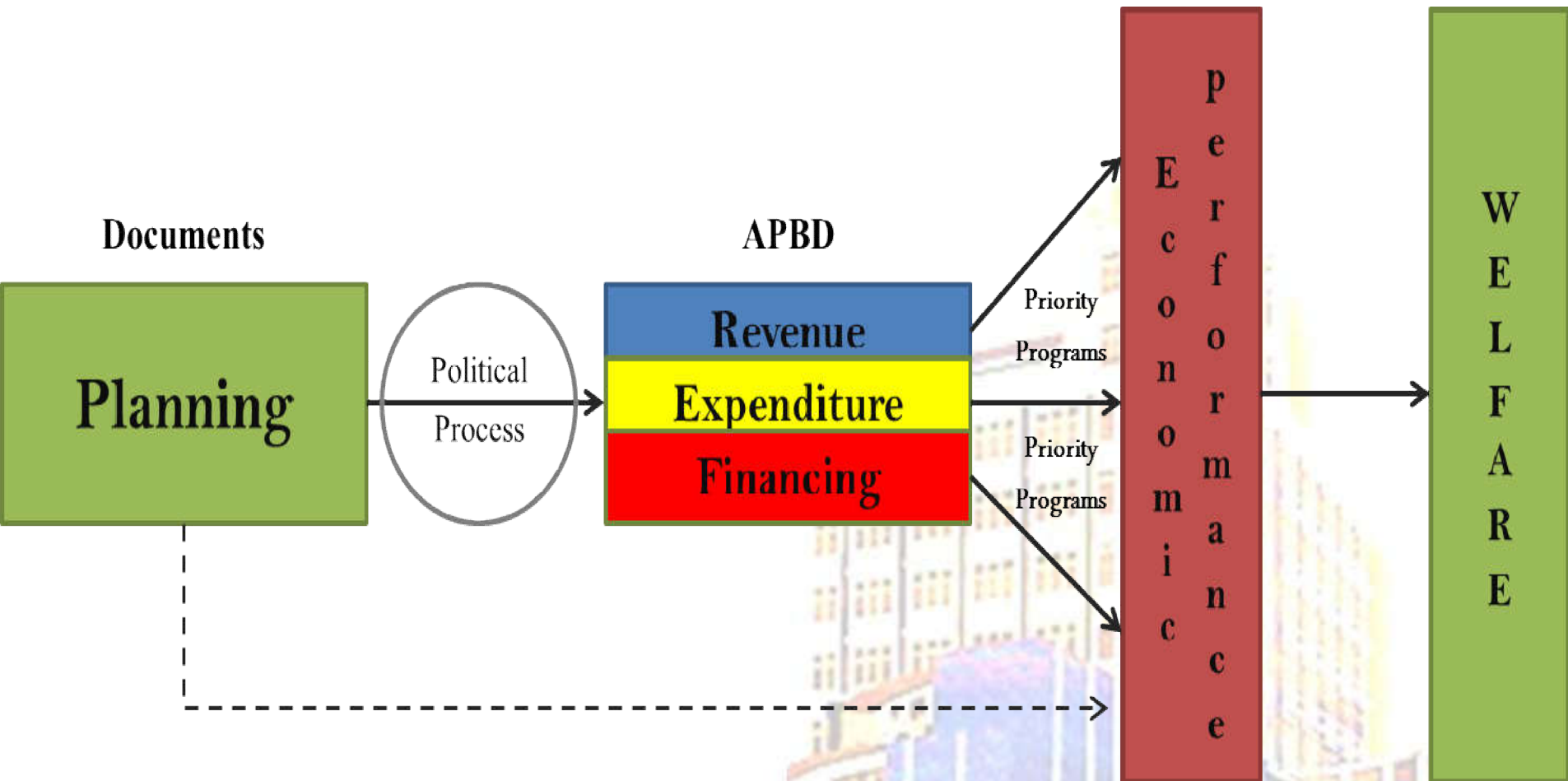
Fokus

- Berfokus pada peningkatan daya saing, meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif

Isu Strategis Pembangunan Daerah



Skema Politik Anggaran dan Kebijakan



Tantangan Pembangunan: Studi Kasus Kapasitas Fiskal Rendah

IKF TINGGI & SANGAT TINGGI (ST)		IKF SEDANG		IKF RENDAH	
PROVINSI	NILAI IKF	PROVINSI	NILAI IKF	PROVINSI	NILAI IKF
DKI	6,36 (ST)	SUMBAR	0,55	SUMUT	0,31
KALTENG	1,17	JAMBI	0,62	SUMSEL	0,39
KALSEL	1,25	KALBAR	0,56	BENGKULU	0,31
KALTIM	3,44 (ST)	SULUT	0,63	LAMPUNG	0,23
BALI	1,27	BANTEN	0,60	JABAR	0,30
BABEL	1,40 (ST)	RIAU	0,98	JATENG	0,18
KEP.RIAU	1,47			DIY	0,40
ACEH	1,70			JATIM	0,24
PAPUA	1,61			SULTENG	0,34
MALUT	1,01			SULSEL	0,34
PAPUA BARAT	2,99 (ST)			SULTRA	0,38
				NTB	0,18
				NTT	0,16
				MALUKU	0,34
				GORONTALO	0,34
				SULBAR	0,49

Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Tantangan Pembangunan: Studi Kasus Jawa Timur



Kemiskinan dan Pengangguran

- Jumlah penduduk miskin Jawa Timur terbesar di Indonesia (sekitar 4,7 juta jiwa atau sekitar 16,79% penduduk miskin Indonesia di Jawa Timur), total penduduk miskin Indonesia sekitar 28 juta jiwa
- TPT sebesar 4,47% atau sekitar 800 ribu pengangguran



Kesenjangan Pembangunan

- 70% PDRB Jatim hanya dibentuk oleh 10 kab/kota (gerbang kertosusili plus)
- Interkoneksi wilayah selatan dan utara yang masih lemah



IPM

- Nilai IPM Jatim sebesar 68,95 atau masih di bawah rata-rata nasional (69,55)

Sumber Pembiayaan Pembangunan



PAD

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- BUMD dan pengelolaan Asset, serta Lain-lain PAD yang Sah



DANA TRANSFER

- DAU
- DAK
- BAGI HASIL PAJAK/NON PAJAK



NON APBD

- Pinjaman Daerah
- CSR
- Hibah dari negara lain, lembaga donor, lembaga multilateral
- Kemitraan, PPP

INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH



INDIKATOR EKONOMI

- PERTUMBUHAN EKONOMI
- PENDAPATAN PER KAPITA
- INFLASI
- INDEKS GINI



INDIKATOR SOSIAL

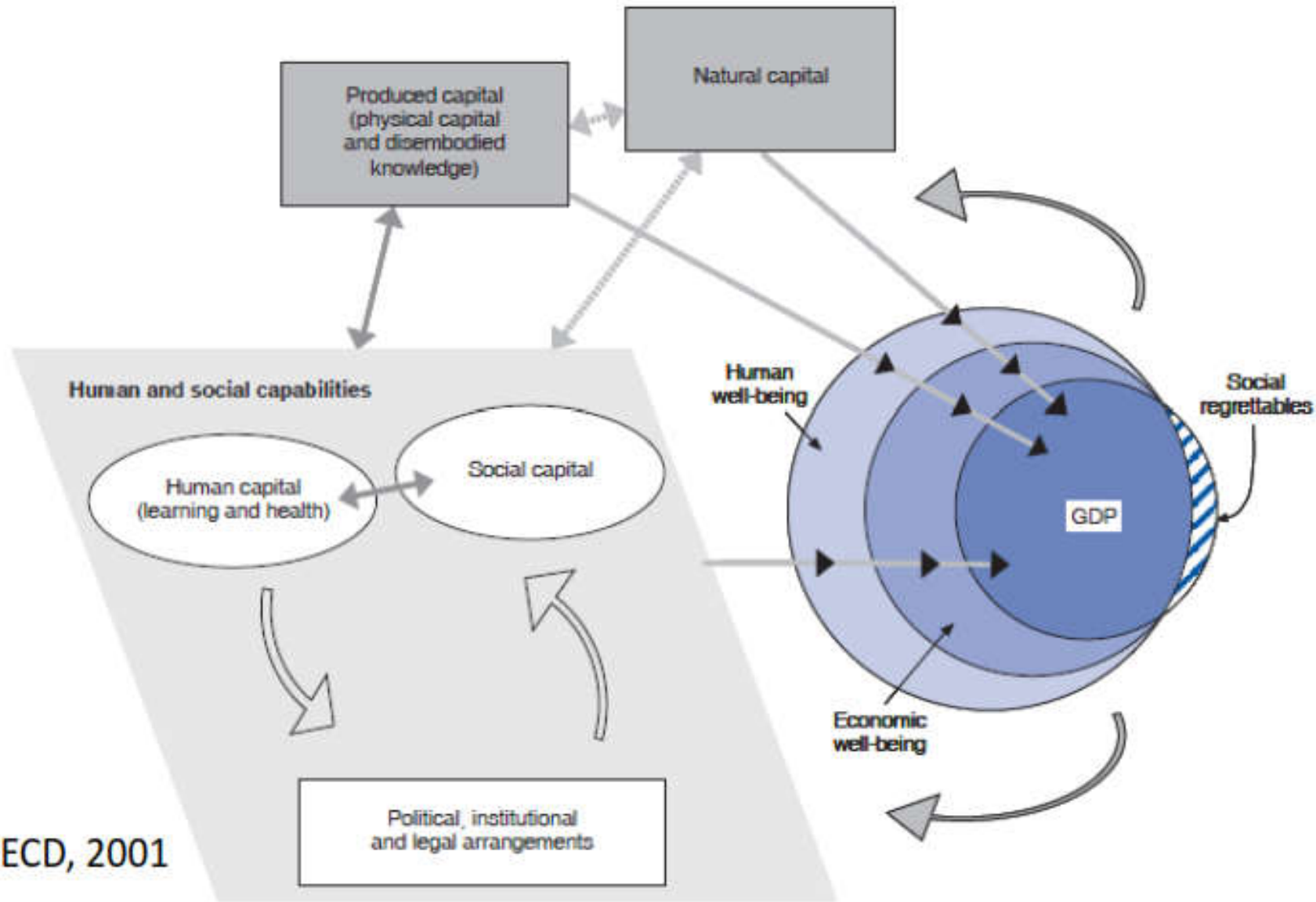
- KEMISKINAN
- PENGANGGURAN



INDIKATOR KESEJAHTERAAN

- IPM
- [The Happiness Index](#)

Pentingnya Modal Sosial dalam Pembangunan Modern



Sumber: OECD, 2001

The background of the slide features a stylized, low-resolution illustration of a city skyline. A prominent yellow banner is centered horizontally across the middle of the image. The buildings are rendered in various colors, including blue, red, and yellow, with some featuring arched windows and doorways. The overall style is reminiscent of a digital painting or a graphic design template.

TERIMA KASIH



Name : Prof. Candra Fajri Ananda , SE., MSc., Ph.D
Place / date of birth : Lumajang, 29 October 1964

Formal Education :

1. Bachelor of Economics in Faculty of Economy of Brawijaya University, Malang, Indonesia
2. Master of Science in Institute of Rural Development, Georg-August-University, Göttingen, Germany
3. Philosophiae doctor in Institute of Rural Development, Georg-August-University, Göttingen, Germany

Education and Training :

1. Fiscal Decentralization in Transition Economies course (Georgia State University, Atlanta, USA,)
2. Local Government Budget course, (Georgia State University, Atlanta, USA,)
3. Wiedereinladungsprogram at Georg-August University, Göttingen, Germany

Work experience :

1. 2013 – present : Dean of Faculty of Economic and business in Brawijaya University Malang
2. 2010 – present : Leader of Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Malang
3. October 2002 : Senior Indonesian Economist in USAID program
4. 2003-March 2004 : Private Sector Development in Post Conflict Area –World Bank Team in post-conflict Area
5. 2009 : Reviewer World Bank
6. 2009 – present : Member of Fiscal Decentralization team in Ministry of Finance Republic Indonesia

Faculty of Economics and Business University of Brawijaya

Jl. MT. Haryono 165 Malang 65145
Tel. 0341-555000 (Hunting), 551 396
Fax. 0341-553834
E-mail: cfajri@ub.ac.id